

Judul : Keadilan Jender: Kekerasan Berlapis pada Perempuan dalam Politik
Tanggal : Selasa, 11 Maret 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

KEADILAN JENDER

Kekerasan Berlapis pada Perempuan dalam Politik

Tidak banyak yang menyadari bahwa perempuan peserta pemilu mengalami kekerasan berlapis dalam Pemilu 2024. Salah satu pelakunya adalah lembaga negara penyelenggara pemilu.

Perempuan di dunia politik mengalami berbagai kekerasan secara bersamaan: kekerasan ekonomi, kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan digital, kekerasan struktural, dan "kekerasan hukum".

Istilah kekerasan hukum diungkap pengajar ilmu hukum pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, dalam peluncuran laporan bertopik "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik: Analisis Pemilu 2024". Laporan yang disusun Women Research Indonesia (WRI) bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD) ini diluncurkan di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Bentuk kekerasan yang dimaksud Titi adalah kekerasan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu 2024. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 8 Ayat 2 mengatur pembulatan ke bawah apabila hasil penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan dua desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50. Padahal, undang-undang mengatur pembulatan ke atas dan telah dilaksanakan dalam dua pemilu berturut-turut sebelumnya.

Meskipun Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan memenangkan gugatan terhadap PKPU tersebut di Mahkamah Agung, KPU tidak memperbaiki putusan itu. Pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga tidak berhasil mengubah PKPU tersebut. Akibatnya, demikian Titi, 207 daftar perempuan calon anggota legislatif (caleg) yang diajukan partai politik tidak memenuhi keterwakilan minimal 30 persen perempuan.

Kekerasan dalam politik

Hasil penelitian WRI yang dipaparkan Sita Aripurnami Kayam pun mengungkap, dari 100 perempuan di politik sebagai responden, 82 persen mengatakan intensitas kekerasan terhadap perempuan dalam politik (KTPP) meningkat di Pemilu 2024 dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pola kekerasan saling terkait dan menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi perempuan. Akibatnya, efektivitas partisipasi perempuan terbatas.

Ahmad Doli Kurnia dari Komisi II DPR yang turut diundang menanggapi hasil penelitian WRI itu pun mengaku baru mengenal KTPP. "Terus terang saya baru mendengar ada kekerasan terhadap perempuan di politik," ujarnya.

Wawancara mendalam dengan responden menemukan, kekerasan seksual dan intimidasi bisa berwujud memegang tangan dengan paksa, memegang bahu, dan pandangan merendahkan. Intimidasi itu bisa juga berupa ancaman nomor urut dalam daftar caleg yang akan terganggu apabila tidak mau ikut rapat sampai malam, yang kadang dilakukan di hotel sampai menginap.

Responden lain mengaku, setelah mengikuti pertemuan politik secara digital, beredar meme dengan narasi "jangan

pilih perempuan sok moralis". Ketika dia protes, serangan semakin gencar.

Satu responden yang gencar mengampanyekan kepentingan perempuan dan transparansi anggaran mendapat ancaman tanpa nama, di antaranya "berhenti bicara atau kami buat diam". Dalam kunjungan ke daerah pemilihannya, seorang pria tidak dikenal membisiki, "Kalau kamu masih berani datang ke sini, lihat saja apa yang akan terjadi."

Pelaporan kepada aparat berwajib ditanggapi sambil lalu dan dianggap sebagai hal biasa dalam politik.

Merugikan demokrasi

Menurut Sita, 86 persen perempuan peserta Pemilu 2024 merasa KТПP berdampak nyata pada kinerja politik mereka. Hanya 14 persen yang menganggap kurang signifikan.

Dampak KТПP sangat luas karena merugikan kualitas demokrasi. Sejumlah responden mengaku enggan terlibat lagi dalam kegiatan politik, melakukan sensor diri sendiri dengan tidak bersuara, dan enggan berpartisipasi dalam proses politik penting. Akibatnya, peran substantif perempuan terhambat dalam pengambilan keputusan politik, suara dan kepentingan perempuan kurang terwakili.

Doli Kurnia, menanggapi hasil penelitian, mengatakan, realitas lapangan yang keras juga dialami laki-laki caleg, termasuk ancaman mengenai nomor urut dalam daftar caleg. Begitu juga kesiapan dana. Dalam masyarakat yang semakin pragmatis, laki-laki caleg juga

Satu responden yang gencar mengampanyekan kepentingan perempuan dan transparansi anggaran mendapat ancaman tanpa nama.

menghadapi masalah yang sama akibat tuntutan calon pemilih di daerah pemilihan.

Bahan revisi UU Pemilu

Doli menjanjikan, hasil penelitian WRI dan WFD akan menjadi masukan pembahasan saat merevisi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu) di Komisi II DPR. Salah satu yang dipertimbangkan adalah membuat sistem campuran proporsional tertutup dan distrik. Dia meminta ada penelitian mengenai pengaruh kebijakan khusus melalui UU Pemilu menaikkan jumlah perempuan di parlemen.

Jumlah perempuan di DPR saat ini 127 orang dari 580 anggota atau 22,1 persen, meningkat dari 8,2 persen pada Pemilu 1999. Walakin, jumlah itu masih di bawah rata-rata dunia saat ini, yaitu 27 persen, berdasarkan data Inter-Parliamentary Union (IPU).

Pengajar ilmu politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar'iyah, mengatakan, perlu berhitung cermat dan penelitian mendalam sebelum mengubah sistem pemilu. Pertempuran terbuka dalam sistem distrik tidak cocok untuk perempuan saat ini. Sistem distrik memerlukan biaya logistik yang sangat besar. Pemenang diperkirakan hanya yang memiliki dana besar atau popularitas tinggi di masyarakat, seperti artis.

Salah satu pendiri lembaga bantuan hukum APIK, Nursyahbani Katjasungkana, menyebut, telah banyak hal dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi ketentuan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diratifikasi pemerintah ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. "Tetapi, belum banyak yang dilakukan dari sisi

budaya," kata Nursyahbani.

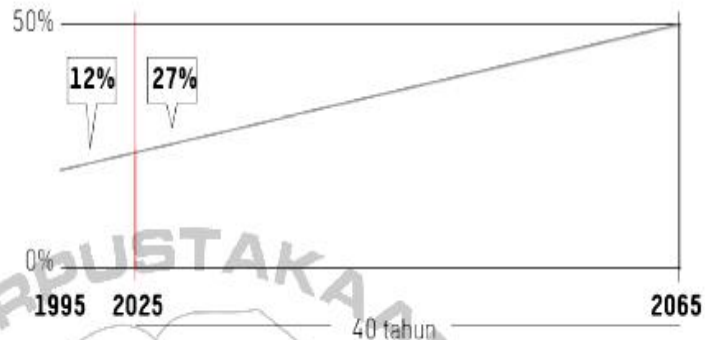
Dia merespons masukan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lestari Moerdijat yang menilai perempuan masih menghadapi kendala budaya sampai hari ini. Perempuan masih dilihat sebagai *konco wingking*, pendamping suami yang tugasnya di dapur.

Secara global, KTPP juga menjadi fenomena. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) Internasional mengutip laporan Parlemen Uni Eropa (2024) dan PBB (2018) menyebut, kekerasan terhadap perempuan di politik terus meningkat. Kekerasan ini menjadi penghalang partisipasi politik, mengancam kesetaraan gender dan demokrasi.

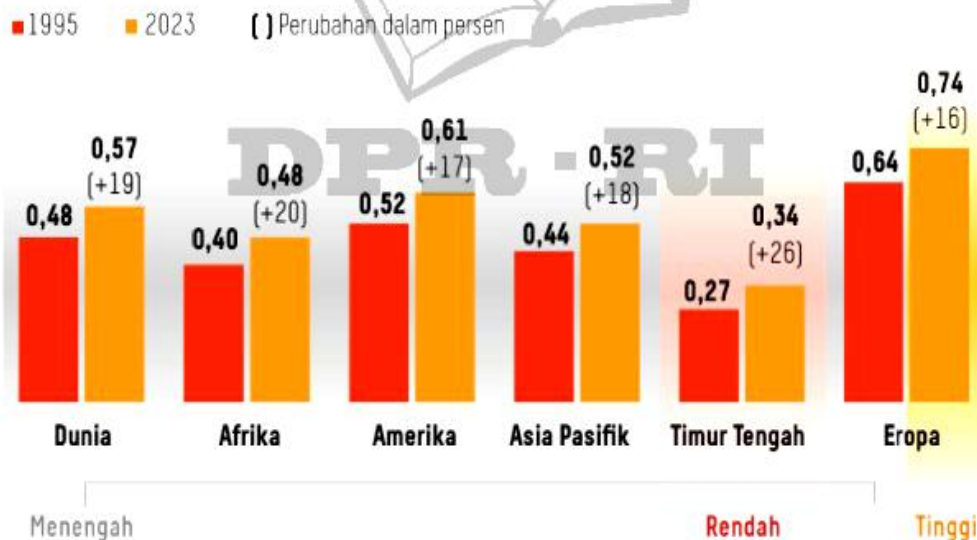
(NINUK MARDIANA
PAMBUDY)

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan untuk Mencapai Kesetaraan Jender di Parlemen?

Keterwakilan perempuan di parlemen meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 12 persen pada 1995 menjadi 27 persen pada 2025. Pada kecepatan saat ini, representasi yang setara di parlemen diproyeksikan akan memakan waktu 40 tahun lagi.



Skor Rata-rata Global dan Regional untuk Kesetaraan Jender 1995 dan 2023



Persentase Peningkatan Skor Kesetaraan Jender pada Indeks GSod 1995-2023



Dampak KТП pada Kinerja Politik



Berdasarkan survei WRI-WFD terhadap perempuan politik peserta Pemilu 2024, sebanyak 86% responden menyatakan bahwa KТП memberikan dampak signifikan terhadap kinerja politik mereka. Angka ini terdiri dari 37% yang menyatakan KТП sangat berdampak dan 49% cukup berdampak, sementara hanya 14% yang menganggap dampaknya kurang signifikan.

Sumber: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Inter-Parliamentary Union, Women Research Institute, The Global of Democracy Indices (2024)



INFOGRAFIK-HICKY, ABIE